

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS
MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN (STUDI KASUS PADA UPTD PRSPD DISABILITAS
LAMPUNG)**

Skripsi

Oleh:

EMI ISNAWATI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS
MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN (STUDI KASUS PADA UPTD PRSPD DISABILITAS
LAMPUNG)**

Oleh:

EMI ISNAWATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIAL**

**Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN (STUDI KASUS PADA UPTD PRSPD DISABILITAS LAMPUNG)

Oleh

Emi Isnawati

Penelitian ini bertujuan menelaah implementasi program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dilaksanakan di UPTD PRSPD Disabilitas Lampung serta sejauh mana program tersebut berkontribusi pada peningkatan kemandirian penyandang disabilitas. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini melibatkan peserta pelatihan sebagai informan utama, serta instruktur dan pekerja sosial sebagai sumber data tambahan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan selama magang, dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelatihan keterampilan seperti pijat, menjahit, membatik, dan tata boga disusun berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta, disertai pendampingan sosial, pembinaan mental, serta penanaman disiplin. Program ini terbukti membantu meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, dan kesiapan peserta menjalani kehidupan mandiri. Meski demikian, sejumlah hambatan masih ditemui, baik dari dalam diri peserta seperti keterbatasan fisik dan rasa kurang percaya diri, maupun dari faktor luar seperti rendahnya penerimaan masyarakat, lemahnya peluang kerja inklusif, serta belum optimalnya kerja sama lembaga. Strategi pemberdayaan yang dilaksanakan UPTD meliputi pemberian motivasi, layanan konseling, dukungan promosi karya, serta koordinasi dengan desa, meskipun sebagian strategi belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten. Berdasarkan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, program ini membantu peserta beradaptasi dengan tuntutan sosial, menginternalisasi nilai-nilai kemandirian, serta memperkuat integrasi mereka dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan program telah memberikan dampak positif, meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek pendukung agar hasil pemberdayaan dapat lebih

Kata kunci: Pemberdayaan, penyandang disabilitas, pelatihan keterampilan kemandirian

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DISABILITY EMPOWERMENT PROGRAMS THROUGH SKILLS TRAINING TO ACHIEVE INDEPENDENCE (A CASE STUDY AT UPTD PRSPD DISABILITAS LAMPUNG)

By

Emi Isnawati

This study aims to examine implementation empowerment program through skills training is implemented at UPTD PRSPD Disabilitas Lampung and to what extent the program contributes to enhancing the independence of persons with disabilities. Using a qualitative approach and a case study method, this research involved training participants as the main informants, while instructors and social workers served as supporting data sources. Data were collected through in-depth interviews, observations conducted during field practice, and document analysis. The findings indicate that skills training such as massage, sewing, batik-making, and culinary skills is designed based on the characteristics and needs of the participants and is accompanied by social assistance, mental guidance, and the cultivation of discipline. The program has been shown to improve participants' self-confidence, communication abilities, and readiness for independent living. However, several obstacles remain, both internal such as physical limitations and low self-confidence and external, including limited community acceptance, insufficient inclusive employment opportunities, and the suboptimal collaboration between institutions. The empowerment strategies applied by UPTD include motivation, counseling services, support for promoting participants' work, and coordination with village authorities, although some of these strategies have not yet been implemented consistently. Based on Talcott Parsons' structural functionalism theory, the program supports participants in adapting to social demands, internalizing values of independence, and strengthening their social integration. Overall, the implementation of this program has shown positive impacts, although improvements in supporting aspects are still needed to maximize empowerment outcomes.

Keywords: empowerment, persons with disabilities, skills training, independence

Judul Skripsi

:**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
DISABILITAS MELALUI PELATIHAN
KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN (STUDI KASUS PADA UPTD
PRSPD DISABILITAS LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: **Emi Isnawati**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2216011007**

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

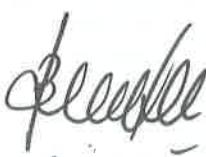
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
NIP. 198503152014041002

2. Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Damar Wibisono, S.Sos., M.A.



Penguji Utama

Dra. Anita Damayantie, M.H.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **6 Januari 2026**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, B. Lampung 35145
Website: <http://sosiologi.fisip.unila.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 30 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Emi Isnawati
NPM 2216011007

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Emi Isnawati, lahir di Desa Rantau Fajar Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur tanggal 30 September 2003. Penulis merupakan anak kedua Dari tiga bersaudara, putri bapak Suprianto dan ibu Yustina Widiyatmi. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 2 Rantau Fajar dan diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Sejahtera dan lulus pada tahun 2019. Kemudian menempuh pendidikan menengah atas di SMA Xaverius Pahoman dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam organisasi UMKM Katolik, serta pernah melaksanakan magang di UPTD PRSPD Disabilitas Lampung pada tahun 2025. Selain itu, penulis turut mengabdikan ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bumi Rahayu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah pada periode 1.

MOTTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

(Yesaya 41:10)

Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka
(Mazmur 147:3)

Let Them, It Will Pass, time is well, all is well

PERSEMBAHAN

Dalam Nama Bapa Putra dan Roh Kudus
Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas berkat, karunia serta
rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam
hidupku, kepada:

Kepada Orang Tuaku Tercinta:

Bapak Suprianto, Ibu Yustina Widiyatmi, Bapak Antonius Riyanto dan Ibu Dwi
Rahayu. Terimakasih atas kasih sayang, doa, kesabaran yang selalu senantiasa
menyertai hidup perjalanan penulis. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud
tanpa pengorbanan dan ketulusan kalian

Kakakku Tersayang:

Dedi Andrianto, terimakasih telah menjadi kakak yang baik dan menyenangkan.
Semoga mendapatkan impian hidup yang didambakan

Adikku Tersayang:

Agnes Reni Aprilia, terimakasih selalu menjadi adik yang ceria dan
menyenangkan. Semoga kelak engkau menapaki jalan terbaik dan meraih cita-cita
yang diimpikan.

Kepada Semua Yang Telah Memberikan Dukungan Kepada Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus, Karena berkat kemurahan-Nya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di FISIP Universitas Lampung sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan kekuatan dan kesabaran. Berkat rahmat-Nya, saya diberikan kesehatan, ilmu, dan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan karya sederhana ini sebaik mungkin;
2. Orang tuaku, Bapak Suprianto, Ibu Yustina Widiyatmi, Bapak Antonius Riyanto dan Ibu Dwi Rahayu, Kakakku Dedi Andrianto, serta adikku Agnes Reni Aprilia yang saya cintai dan banggakan. Terimakasih atas kasih sayang doa, dan dukungan yang selalu menguatkan saya disetiap langkah hidup saya. Tanpa bimbingan, kepercayaan, dan doa kalian, saya tidak akan bisa menjadi pribadi yang kuat dan lebih baik seperti sekarang. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud usaha saya untuk membanggakan dan membahagiakan keluarga.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, S.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung;

6. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
7. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. Selaku dosen pembahas skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam menjalani setiap langkah kehidupan;
8. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. Selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas kesabaran, ilmu, dan arahan yang Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak selalu dilimpahkan kelancaran, kebahagian dan kesuksesan dalam setiap langkah dan kehidupan Bapak;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan staff jurusan sosiologi Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, dan ketulusan dalam mendidik selama masa perkuliahan;
10. Seluruh teman-temanku Sosiologi Universitas Lampung angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman berharga yang kita lalui bersama. Semoga pertemanan kita dapat selalu terjaga dan bisa selalu saling mendukung kedepannya;
11. Untuk saudaraku tersayang Sisilia Dela terimakasih sudah menjadi tempatku berkeluh kesah, menjadi pendengar yang setia, yang selalu percaya padaku, dan selalu memberikan semangat serta dukungan dalam setiap proses selama ini. Terimakasih sudah menjadi saudara dan teman terbaikku.
12. Untuk sahabat-sahabatku manusia Riweuh (Ifa, Casandra, Lita). Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, penulis bersyukur karena bertemu dengan teman-teman yang baik. Selalu ada ketika penulis senang maupun sedih. Tanpa kalian mungkin penulis menjalani perkuliahan ini tidak sesenang sekarang. Semoga pertemanan ini terus berlanjut sampai nanti kita tua.
13. Untuk sahabatku Filipa Mutiara, terimakasih untuk segala waktu, perjuangan yang telah diberikan di dalam persahabatan kita. Terimakasih

sudah menjadi sahabat ku yang baik dan selalu siap mendengarkan setiap cerita hidupku.

14. Untuk sahabatku Jeani Catur Prameswari, terimakasih atas segala dukungan, kebersamaan dan semangat yang tidak pernah berhenti selama dalam persahabatan. Kehadiranmu menjadi semangat dalam menjalani skripsi ini.
15. Untuk Aulia sahabatku terimakasih atas semangat, bantuan dan kebersamaan kita dari maba. Semoga kita bisa mencapai cita-cita yang kita impikan.
16. Untuk sahabat-sahabat SMA ku (Shalom, Keira, Tasya Melis), Terimakasih atas kebersamaan dan perhatian yang tidak pernah putus hingga hari ini. Dukungan kalian baik berupa semangat, candaan, cerita menjadi sumber energi bagi penulis. Kehadiran kalian sebagai sahabat sejak SMA hingga sekarang adalah hal yang sangat penulis syukuri.
17. Untuk teman-teman KKN ku (Febby, Henny, Riski, Riska, Ferdy, Habibi) terimakasih atas kebersamaan dan kerjasama, serta dukungan yang saling diberikan selama masa pengabdian. Pengalaman yang kita jalani bersama tidak hanya memberikan pelajaran berharga, tetapi juga menjadi sumber semangat. Terimakasih sudah menjadi tim yang saling menguatkan dan memberikan energi positif.
18. Terakhir untuk diriku sendiri, yang tidak pandai dalam menunjukkan perasaan, tapi tetap untuk memilih bertahan sejauh ini untuk menyelesaikan semuanya. Terimakasih untuk tidak menyerah meski di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terimakasih telah memilih melanjutkan meski seringkali tidak tahu pasti arah ini akan membawa kemana. Terima kasih karena telah menjadi teman yang baik untuk diri sendiri. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, walaupun kenyataan tidak sesuai harapan. Meski pernah mengalami kegagalan, takut, kesepian, kebingungan bahkan perasaan ingin menyerah. Terimakasih tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut membatasi langkah, karena keberanian

bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak walaupun pelan.

Penulis berdoa kepada Tuhan agar membalaas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini tetap bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, meskipun isi dan penyusunannya mungkin belum sempurna.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Emi Isnawati

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pemberdayaan	6
2.1.1 Pengertian Pemberdayaan	6
2.1.2 Strategi Pemberdayaan	8
2.1.3 Proses Pemberdayaan.....	9
2.1.4 Tujuan Pemberdayaan.....	10
2.2 Tinjauan Disabilitas	11
2.2.1 Pengertian Disabilitas	11
2..2.2 Jenis Jenis Disabilitas	11
2.3 Pelatihan Keterampilan	12
2.4 Program Pemberdayaan pada Disabilitas	13
2.4.1 Rehabilitasi	14
2.4.2 Pendidikan	14
2.4.3 Kesehatan.....	15
2.5 Pengertian Kemandirian.....	15
2.5.1 Pelaksanaan Program	16
2.6 Peran UPT Disabilitas	17

2.7 Landasan Teori	18
2.8 Penelitian Terdahulu	20
2.9 Kerangka Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Lokasi penelitian.....	27
3.4 Informan Penelitian	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
4.1 Gambaran Umum UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	35
4.2 Tujuan, Visi, dan Misi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung	35
4.3 Tugas dan Fungsi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung	36
4.4 Struktur Organisasi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.....	36
4.5 Layanan atau Fasilitas UPTD PRSPD	38
4.6 Program Rehabilitasi Sosial UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung mencakup beberapa aspek:	38
4.7 Persyaratan Penerimaan Calon Kelayan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung	39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	40
5. 1 Profil Informan.....	40
5.2 Hasil Penelitian	43
5.2.1 Pelaksanaan Program Pelatihan Keterampilan di UPTD Disabilitas Lampung dalam Membentuk Kemampuan Dasar Penyandang Disabilitas untuk Hidup Mandiri.....	43
5.2.2 Hambatan yang dihadapi Penyandang Disabilitas	50

5.2.3 Strategi Pemberdayaan yang Diterapkan UPT Disabilitas Lampung dalam Mewujudkan Kemandirian Penyandang Disabilitas.....	73
5.3 Pembahasan	78
5.3.1 Pelaksanaan Program Pelatihan Keterampilan di UPTD Disabilitas Lampung Dalam Membentuk Kemampuan Dasar Penyandang Disabilitas Untuk Hidup Mandiri.....	78
5.3.2 Hambatan yang dihadapi Penyandang Disabilitas	84
5.3.3 Strategi Pemberdayaan yang Diterapkan UPT Disabilitas Lampung dalam Mewujudkan Kemandirian Penyandang Disabilitas	88
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
6.1 Kesimpulan	90
6.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Tabel Informan Penelitian4	2
Tabel 5.2 Pelaksanaan Program.....	49
Tabel 5.3 Hambatan Internal pada Penyandang Disabilitas	57
Tabel 5.4 Hambatan Eksternal Pada Penyandang Disabilitas	71
Tabel 5.5 Strategi Pemberdayaan	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	36

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Individu penyandang disabilitas kerap menghadapi perilaku diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari, dan masalah ini telah didokumentasikan di berbagai belahan dunia. Perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal. Selain itu, sikap diskriminatif ini juga melanggar tujuan hak asasi manusia dan keadilan sosial yang menjadi cakupan utama dalam bidang pekerjaan sosial. Istilah "penyandang disabilitas" mengacu pada individu dengan keterbatasan fisik atau non-fisik (Sholeh, 2020). Mereka yang mengalami keterbatasan baik secara fisik maupun mental disebut sebagai penyandang disabilitas. Dalam jangka panjang, mereka sering kali menghadapi kendala dalam berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan hak, terutama dalam interaksi dengan lingkungan sekitar serta perspektif sosial masyarakat (Widinarsi, 2019).

Penyandang disabilitas sering merasa dikucilkan dan tidak dihargai. Selain itu, sangat jarang mereka memiliki pekerjaan tetap atau kontrak. Ini karena kurangnya kepercayaan kepada kaum penyandang disabilitas. Namun, sudah jelas bahwa seorang disabilitas adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang lain (Kristiandy, 2021).

Persoalan lain yang kompleks adalah rendahnya tingkat kemandirian penyandang disabilitas hingga saat ini masih menjadi persoalan yang kompleks dan belum sepenuhnya teratasi. Meskipun berbagai program pemberdayaan telah dirancang melalui pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, tata boga, hingga pijat

refleksi, namun kenyataannya tidak semua peserta berhasil menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari mereka masih bergantung pada bantuan keluarga atau lingkungan sekitar dan belum mampu mengakses pekerjaan secara mandiri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program pemberdayaan yang ideal dengan hasil yang dicapai di lapangan, khususnya dalam aspek kemandirian sosial dan ekonomi. Padahal, kemandirian merupakan bagian dari hak dasar penyandang disabilitas yang seharusnya dijamin oleh negara. Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta minimnya dukungan lingkungan menjadi hambatan utama yang menghalangi tercapainya kemandirian yang utuh bagi anak-anak disabilitas.

Kondisi serupa juga terlihat di UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung. Lembaga ini telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan keterampilan, namun belum semua penyandang disabilitas berhasil menerapkan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kemandirian mereka. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program dengan hasil nyata di lapangan.

Pemerintah berharap rehabilitasi sosial ini membantu penyandang disabilitas mampu melakukan aktivitas sosial dalam struktur kehidupan dan aktivitas masyarakat. Diharapkan penyandang disabilitas netra dan tubuh berhasil mengikuti dan menyelesaikan program dan memiliki keterampilan kerja untuk hidup mandiri. Namun, berdasarkan data terbaru dari BPS pada tahun 2023, jumlah pekerja disabilitas masih rendah, mencapai 763.925 orang, atau 0,55 persen dari total tenaga kerja nasional, sedikit lebih tinggi dari data tahun 2022, 720.748 orang, atau 0,53%. Jumlah ini, bagaimanapun, jauh dari yang diharapkan. Sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, dan banyak yang menjadi wirausaha. Ini karena terbatasnya peluang di sektor formal dan industri. Ini menunjukkan bahwa proporsi disabilitas di dunia kerja masih sangat kecil.

Penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses pelayanan publik, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena minimnya fasilitas pendukung yang tersedia di tempat-tempat pelayanan publik

(Yaini, 2020). Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah perlu berperan aktif melalui kebijakan yang mendorong terciptanya kabupaten atau kota layak anak. Bentuk dukungan ini mencakup penyediaan sarana, prasarana, sumber daya manusia, serta layanan yang inklusif sehingga mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (Mozes, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Joesyiana & Susanti 2022), menunjukkan bahwa dari berbagai program pelatihan pemberdayaan untuk penyandang disabilitas, keikutsertaan peserta seringkali tidak disertai dengan semangat, minat, kemauan, dan kepercayaan diri yang cukup, ditambah dengan minimnya dana serta ketidaktahuan tentang cara dan tempat untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, setelah diadakan sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), disabilitas di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyadari perlunya pelatihan yang lebih khusus, terutama yang berkaitan dengan strategi bisnis dan kewirausahaan. Ini menunjukkan bahwa setiap penyelenggara program, seperti UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa, mentor kewirausahaan, dan pelaku usaha, perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan program pelatihan dan membuka peluang bagi orang-orang disabilitas di Provinsi Riau. Dengan mengadakan program pemberdayaan kewirausahaan yang lebih beragam, usaha ini diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian penyandang disabilitas, yang pada akhirnya akan mendukung komunitas mereka.

Hasil survei yang dilakukan selama magang banyak dari mereka sempat menghadapi masalah dana dari pemerintah, berakibat kegiatan pelatihan terhenti. Sebaliknya, seiring dengan peningkatan kualitas masyarakat dan peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja, daya saing penyandang disabilitas juga menurun. Program pelatihan pemberdayaan kewirausahaan yang kurang bervariatif serta fasilitas, sarana, dan prasarana yang masih belum maksimal. Kurangnya tenaga profesional khusus dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada penerima manfaat Rehabilitasi sosial seharusnya menjadi solusi untuk membantu penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri dan menjalani kehidupan yang lebih baik, tetapi dalam kenyataannya, tidak banyak yang terjadi. Akibatnya, masalah

hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya diselesaikan. Sampai saat ini, kemandirian penyandang disabilitas masih merupakan masalah yang kompleks dan belum sepenuhnya teratasi.

Salah satu aspek yang memperparah kondisi ini adalah kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Di antara hambatan tersebut adalah kurangnya informasi lowongan kerja yang inklusif, kurangnya fasilitas pendukung di tempat kerja, dan stigma sosial bahwa perusahaan tidak akan menerima kandidat penyandang disabilitas. Ini semakin membedakan hasil nyata dan tujuan program pemberdayaan, terutama dalam hal mencapai kemandirian sosial dan ekonomi. Berdasarkan urgensi dan relevansi peneliti melakukan dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Disabilitas Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Untuk Mewujudkan Kemandirian (Studi Pada UPTD Disabilitas Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana implementasi program pelatihan keterampilan di UPT Disabilitas Lampung dalam membentuk kemampuan dasar penyandang disabilitas untuk hidup mandiri?
- 2) Apa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses lapangan pekerjaan setelah mengikuti program pelatihan keterampilan di UPT Disabilitas Lampung?
- 3) Bagaimana strategi pemberdayaan yang diterapkan UPT Disabilitas Lampung dalam mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas didapatkan tujuan dari penelitian sebagai berikut

- 1) Untuk mengetahui implementasi program pendidikan dan pelatihan keterampilan di UPT Disabilitas Lampung dalam membentuk kemampuan dasar penyandang disabilitas untuk hidup mandiri
- 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses lapangan pekerjaan setelah mengikuti program pelatihan keterampilan di UPT Disabilitas Lampung
- 3) Untuk mengetahui strategi pemberdayaan yang diterapkan UPT Disabilitas Lampung dalam mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis diharapkan agar penelitian ini berkontribusi pada kemajuan pengetahuan, khususnya dalam ranah studi sosiologi. Penelitian ini secara teoritis memperkaya penerapan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dalam konteks program pemberdayaan sosial untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mempelajari masalah sosial dan kemandirian penyandang disabilitas dari sudut pandang teori sosial.

Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat membantu UPT Disabilitas Lampung mengevaluasi dan membuat program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan instansi sosial lainnya saat mereka membuat kebijakan atau program yang mendukung kemandirian sosial dan ekonomi penyandang disabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pemberdayaan

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Secara harfiah istilah pemberdayaan (dalam bahasa Inggris disebut dengan *empowerment*), berasal dari kata memberdayakan (*to empower*), yang berarti memberi daya atau otoritas kepada; memberi kemampuan kepada; memungkinkan; mengizinkan. Memberdayakan sering diterjemahkan sebagai upaya memberikan kekuatan kepada orang atau kelompok yang lemah atau tidak beruntung agar mereka menyadari keadaan dirinya dan pada akhirnya mampu melakukan aksi untuk keluar dari lingkaran tidak beruntungannya. Memberdayakan juga dapat berarti membagi kekuasaan dari orang atau kelompok yang berkuasa (*powerful*) kepada mereka yang tidak memiliki (*powerless*) agar terjadi keseimbangan antara penguasa dan yang dikuasai sehingga kondisi-kondisi memperdayai tidak terjadi.

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan orang lain. Ini dilakukan dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran orang tentang potensi mereka dan berusaha untuk mengubah potensi mereka menjadi kenyataan. Upaya untuk meningkatkan martabat dan harkat orang miskin sehingga mereka dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memberi individu, kelompok, dan masyarakat luas kemampuan untuk membuat pilihan dan mengontrol lingkungan mereka agar mereka dapat memenuhi keinginan-keinginannya,

seperti mendapatkan akses ke sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosial, dan lainnya (Hayati, 2019).

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain. Pemberdayaan dilakukan dengan mendorong atau mendukung dengan menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan, mengetahui potensi, dan berusaha untuk mengembangkan setiap potensi yang ada. Pemberdayaan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih makmur. Selama proses pemberdayaan, tujuan utama yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan kapasitas manusia yang mencakup kepribadian, keahlian, dan kemampuan yang relevan dengan lingkungan kerja (Baturangka dkk., 2019).

Pemberdayaan juga merupakan proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pemberdayaan berfokus pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup fisik, ekonomi, dan sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai penghasilan, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Terlepas dari kenyataan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, ada kelompok lain yang melihat pemberdayaan sebagai suatu program atau suatu proses. Mereka melihat pemberdayaan sebagai suatu program dengan mempertimbangkan tahapan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, yang biasanya ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pemberdayaan sebagai suatu proses berlangsung sepanjang hidup seseorang.

2.1.2 Strategi Pemberdayaan

Ketika melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat, ada lima elemen penting yang dapat dilakukan, yaitu (Maitha, 2024):

- 1. Bentuk Motivasi yang Diberikan**

Motivasi dalam konteks UPTD PRSPD adalah usaha memberikan dorongan semangat, keyakinan, dan kepercayaan diri kepada penyandang disabilitas agar mereka yakin pada potensi diri, termotivasi ikut dalam program rehabilitasi, serta mau berkembang sosial dan mandiri.

- 2. Layanan Bimbingan Konseling dan Mental**

Layanan bimbingan konseling dan bimbingan mental merupakan pendampingan psikologis dan emosional yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk membantu mereka menghadapi permasalahan pribadi, menerima kondisi diri, serta membangun konsep diri yang positif. Melalui konseling individual maupun kelompok, peserta didorong untuk mengekspresikan perasaan, berbagi pengalaman, dan saling memberikan dukungan, sehingga kondisi mental, rasa percaya diri, dan kesiapan sosial mereka dapat meningkat.

- 3. Dukungan Dalam Promosi**

Dukungan dalam promosi merupakan strategi UPTD PRSPD dalam memperkenalkan layanan, program, dan capaian kepada masyarakat luas serta pihak-pihak terkait. Kegiatan promosi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai peran UPTD PRSPD sekaligus menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Melalui promosi, UPTD PRSPD berupaya membuka akses dan peluang yang lebih luas, khususnya dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan. Selain itu, promosi juga membantu membangun citra positif penyandang disabilitas di tengah masyarakat.

4. Meningkatkan Kesadaran ke Masyarakat

Strategi meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas. UPTD PRSPD berupaya mengurangi stigma dan diskriminasi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta kerja sama dengan berbagai pihak di lingkungan masyarakat. Dengan adanya peningkatan kesadaran, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai hak dan keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

5. Strategi berkelanjutan

Strategi berkelanjutan merupakan perencanaan berkelanjutan yang disusun UPTD PRSPD untuk memastikan program pemberdayaan tidak berhenti pada tahap pelatihan saja. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, UPTD PRSPD menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk membuka peluang kerja dan pengembangan diri bagi peserta. Monitoring dan evaluasi program juga dilakukan secara berkala guna menilai keberlanjutan dan dampak dari layanan yang diberikan.

2.1.3 Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan harus terus dilakukan dengan upaya untuk memberdayakan masyarakat lemah agar dapat mencapai masa depan dalam meningkatkan kehidupan pribadi dan keluarganya. "Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian lepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi" (Sumodinigrat, dalam Sulistiyani 2004). Menurut Sulistiyani (2004), proses pemberdayaan dapat dimulai dengan beberapa tahap.

- a. Tahap perencanaan dalam proses pemberdayaan masyarakat meliputi pembentukan kesadaran dan perilaku. Dengan menekankan lebih banyak pada penyadaran pada tahap ini, masyarakat akan lebih sadar

akan kebutuhan dan kondisi kehidupan saat ini. agar mereka sadar akan pentingnya perbaikan kehidupan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

- b. Jika tahap pertama proses transformasi pengetahuan dan keterampilan telah terkondisi dengan baik, tahap kedua dapat berjalan dengan baik, penuh semangat, dan efektif.
- c. Tahap pengembangan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan untuk membangun kemampuan mandiri. Kemampuan masyarakat untuk mengambil inisiatif, menjadi kreatif, dan menciptakan sesuatu baru di lingkungannya akan menunjukkan kemandirian.

2.1.4 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah untuk memberikan kebebasan kepada individu dan kelompok rentan tersebut untuk mengemukakan pendapat dan memerangi masalah seperti sakit, kelaparan, dan kebodohan. Selain itu, pemberdayaan memberikan mereka akses ke sumber daya yang menghasilkan uang yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan dalam situasi ini bukan hanya merupakan tujuan; itu adalah proses yang mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan individu atau kelompok yang rentan dalam masyarakat. Hal ini termasuk memberikan dukungan sosial dan kelembagaan, serta pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi ketidakberdayaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Tujuan pemberdayaan adalah untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber produktif yang memungkinkan individu atau kelompok rentan untuk menghasilkan lebih banyak uang dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Contoh sumber-sumber ini termasuk akses ke peluang ekonomi, pelatihan keterampilan, pendidikan, modal usaha, dan dukungan lainnya yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka (Suharto, 2014).

2.2 Tinjauan Disabilitas

2.2.1 Pengertian Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang berlangsung untuk jangka waktu lama dan dapat menghambat mereka dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama orang lain dengan hak yang sama. Istilah "penyandang cacat" dan "penyandang cacat" sudah tidak digunakan lagi karena dinilai diskriminatif terhadap penyandang disabilitas (Satria dkk., 2023). Berdasarkan definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), disabilitas diartikan sebagai "Sebuah pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan sebuah aktivitas dengan cara atau dalam rentang yang dianggap normal bagi manusia, yang sebagian besar disebabkan oleh apa yang disebut impairment." Definisi ini secara jelas menyebut bahwa disabilitas adalah keterbatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan dalam cara atau rentang yang dianggap normal oleh manusia.

2.2.2 Jenis Jenis Disabilitas

Dalam proses belajar mengajar, guru dapat mempertimbangkan karakteristik penyandang disabilitas yang terkait dengan kondisi fisik maupun psikis. Menurut Chodzirin (2013), berikut ini jenis penyandang disabilitas yang menjadi fokus penelitian:

1. Tunanetra

Menurut Kaufirman dan Hallahan dalam Mudjito, dkk., tunanetra adalah gangguan penglihatan atau kebutaan baik sebagian maupun total. Akurasi penglihatan kurang dari 6/60 atau tidak ada lagi. Tunanetra dapat dikategorikan menjadi dua golongan dalam hal ini: buta total (*blind*) atau lemah penglihatan (*low vision*). Proses pembelajaran berfokus pada indra peraba dan pendengaran karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan. Oleh karena itu, prinsip yang harus diperhatikan saat mengajar individu tunanetra adalah media yang digunakan harus tactual dan bersuara, seperti rekaman rekaman dan program JAWS (*Job Access With Speech*).

Untuk membantu mereka beraktivitas di sekolah, orientasi dan mobilitas mencakup pemahaman tentang bagaimana tunanetra mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat putih (tongkat khusus tunanetra).

2. Tunadaksa

Tunadaksa adalah orang yang mengalami gangguan gerak karena kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang diturunkan, sakit, atau akibat kecelakaan. Termasuk lumpuh, polio, dan *celebral palsy*. Pada tunadaksa, tingkat gangguan diklasifikasikan menjadi ringan, yang berarti bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi. Tingkat gangguan sedang, yang berarti bahwa mereka mengalami gangguan koordinasi sensorik dan mengalami keterbatasan motorik, dan tingkat gangguan berat, yang berarti bahwa mereka sepenuhnya terbuka dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrolnya. Proses belajar tunadaksa disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Secara fisik, penyandang tunadaksa menghadapi kendala mobilitas, tetapi secara intelektual mereka tidak mengalami hambatan dalam proses belajar. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus menyediakan aksesibilitas seperti tangga berjalan dan eskalator untuk orang dengan kursi roda.

2.3 Pelatihan Keterampilan

Pelatihan adalah aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan atau pengetahuan yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan penjualan tertentu. Untuk meningkatkan kinerja di masa depan, memerlukan pelatihan dan pendampingan yang efektif. Pelatihan dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja Indonesia (Yanti dkk., 2022). Pelatihan ini termasuk aspek pendidikan dan pengembangan. Salah satu tugas manajemen penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia suatu organisasi terus berkembang adalah pelatihan. Setiap pelatihan harus difokuskan pada pencapaian tujuan tertentu yang terkait dengan upaya mencapai tujuan organisasi. Proses pelatihan adalah serangkaian tindakan yang saling berhubungan

yang dilakukan secara bertahap, berurutan, dan bertahap. Mereka yang belum terlalu lama di pasar kerja, karyawan yang ingin meningkatkan kemampuan mereka, dan mereka yang baru saja mulai karir mereka dapat mengakses pelatihan kerja (Nasution & Irham 2024).

Keterampilan yang diberikan UPT Disabilitas Lampung adalah:

- a) Bimbingan membaca menulis braile
- b) Pijat massage
- c) Bahasa isyarat
- d) Membatik
- e) MMP (Membaca Menulis Braile)
- f) Tata Rias
- g) Memasak
- h) Menjahit
- i) Bimbingan mental
- j) Musik
- k) Bahasa isyarat
- l) Computer bicara

Kegiatan pelatihan bertujuan untuk mewujudkan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, sehingga bisa membantu mereka berintegrasi ke dalam lingkungan kerja. Bagi yang sudah memiliki pekerjaan, pelatihan keterampilan ini berfungsi juga sebagai usaha untuk mengembangkan karir, yang melibatkan pemahaman diri mengenai kepribadian, minat, keterampilan, dan kemampuan individu (Kerka 2002).

2.4 Program Pemberdayaan pada Disabilitas

Program pemberdayaan pada penyandang disabilitas merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta peran aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Berikut program pemberdayaan yang diberikan oleh UPTD PRSPD dalam mendukung proses

rehabilitasi dan pengembangan potensi penyandang disabilitas. Berikut ini program yang diberikan UPTD kepada penyandang disabilitas;

2.4.1 Rehabilitasi

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas, yang selama ini sering terhambat oleh berbagai keterbatasan yang mereka alami. Program ini juga ditujukan untuk memulihkan kondisi mereka yang kerap menghadapi masalah sosial, seperti rendahnya tingkat pemberdayaan, sehingga mereka dapat kembali berdaya, mandiri, serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk upaya dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kelompok ini. Pada dasarnya, implementasi suatu kebijakan atau program dirancang untuk menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat, meskipun tidak jarang pula kebijakan tersebut justru dapat memunculkan persoalan baru apabila tidak dilaksanakan dengan optimal (Kurniawan, 2020).

2.4.2 Pendidikan

Layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dari pendidikan untuk masyarakat umum. Hal ini karena mereka memiliki karakteristik khusus, baik secara fisik maupun perkembangan, sehingga memerlukan bentuk pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks pendidikan, anak dengan disabilitas dikenal melalui pendidikan khusus yang disebut Pendidikan Luar Biasa atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Terkait hal tersebut, hak akses pendidikan bagi penyandang disabilitas sebenarnya telah dijamin oleh regulasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 8 Ayat 1 menegaskan bahwa warga negara dengan kelainan fisik dan mental berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. Ketentuan ini diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa warga negara dengan hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, maupun sosial berhak memperoleh layanan pendidikan khusus (Cahyono, 2017).

2.4.3 Kesehatan

Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 25 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang gratis atau terjangkau dengan kualitas dan standar yang setara dengan layanan bagi masyarakat umum. Ketentuan ini mencakup layanan kesehatan umum, kesehatan seksual dan reproduksi, serta program kesehatan masyarakat. Selain itu, negara juga berkewajiban menyediakan layanan kesehatan khusus sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Bentuk layanan tersebut dapat berupa pendampingan di fasilitas kesehatan, layanan perawatan di rumah (home care), bangunan dan fasilitas kesehatan yang aksesibel, layanan kesehatan reproduksi seperti USG yang ramah difabel, serta dukungan psikologis bagi penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.

2.5 Pengertian Kemandirian

Mandiri atau kemandirian mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan apa pun secara mandiri atau individual (mandiri) tanpa campur tangan orang lain. Kemandirian berarti seseorang sudah cukup dewasa untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia mampu memutuskan apa yang harus dia lakukan dan berani mengambil resiko dari keputusan yang ia ambil (Suparmi dkk., 2018).

Menurut Silrant (2019), bertanggungjawab berarti memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri atau seseorang yang tidak bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada hubungannya kemandirian yang memiliki *self esteem* (penghargaan terhadap dirinya sendiri), kesadaran diri, dan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Secara fisik, pola tingkah laku dapat digunakan untuk mengukur kemandirian anak. Selain itu, sosialisasi dan perilaku emosional anak dapat digunakan untuk mengukur kemandirian. Oleh karena itu, harus belajar untuk menjadi individu yang dapat mandiri.

Kemandirian penyandang disabilitas bisa diupayakan dengan pengembangan karir yakni melalui kegiatan pelatihan dalam pembekalan yang sesuai kebutuhannya (Aprilia dkk., 2019). Kemandirian tidak hanya sebatas kemampuan dalam mengurus diri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan memasuki jenjang dunia kerja. Bagi penyandang disabilitas, kemandirian ditandai dengan kemampuan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk memperoleh penghasilan secara mandiri. Hal ini berarti penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada bantuan keluarga atau lingkungan sekitar, tetapi mampu bersaing dan beradaptasi di dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal. Dengan demikian, kemandirian menjadi prasyarat penting agar penyandang disabilitas dapat meningkatkan taraf hidup, mengurangi ketergantungan, serta berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.5.1 Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program yang diberikan UPT lampung terhadap Penyandang Disabilitas melalui rehabilitasi. Menurut Ismawati & Hartanto (2018) Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas pada umumnya terbagi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Rehabilitasi medis adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menyeluruh yang diberikan melalui tindakan medis untuk membantu mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin.
2. Rehabilitasi Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan pelayanan pendidikan yang dilakukan melalui proses belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat mengikuti pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
3. Rehabilitasi Sosial adalah sebuah proses pelayanan sosial yang menyeluruh dan terpadu, dilakukan melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial agar individu dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Rehabilitasi vokasional adalah kegiatan pelayanan yang secara menyeluruh dan terpadu yang berfokus pada memberikan keterampilan dan pelatihan untuk membantu individu memperoleh kemampuan penyesuaian diri.

2.6 Peran UPT Disabilitas

Pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas tubuh harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya dengan baik, termasuk memberikan bimbingan kesehatan dan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan psikososial, bimbingan spiritual, bimbingan belajar, bimbingan keterampilan kerja, dan resosialisasi. Namun, sebagai fasilitator, pemerintah mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang agar prosesnya lancar dan nyaman.

Peranan menggambarkan bagaimana individu diharapkan berperilaku dalam konteks sosial, berkaitan dengan status sosial yang mereka miliki. Peranan ini melibatkan pembentukan serangkaian perilaku yang saling berkaitan dan dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, serta berkaitan dengan perkembangan perubahan perilaku tersebut (Eko 2013). Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mendukung penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan ramah untuk mereka. Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang setara dan adil dalam masyarakat, terdapat berbagai tanggung jawab dan tugas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Fasilitas dan layanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah. Itu termasuk infrastruktur fisik yang ramah disabilitas, seperti transportasi publik yang dapat diakses, bangunan umum yang dapat diakses, dan fasilitas publik lainnya yang dapat dijangkau dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan pendidikan inklusif tersedia, layanan kesehatan yang sensitif terhadap disabilitas, dan dukungan sosial dan ekonomi yang dibutuhkan penyandang disabilitas dan keluarganya.

Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi program dan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas. Meliputi membuat peraturan yang mendukung hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dan mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk

memastikan hak-hak mereka dilindungi. Pemerintah daerah di Provinsi Lampung memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa program pemberdayaan penyandang disabilitas direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sangat penting untuk membuat lingkungan di daerah ini inklusif dan mendukung penyandang disabilitas (Supron, 2025).

UPT Disabilitas adalah salah satu fasilitas penunjang yang dimiliki kota Bandarlampung, Provinsi Lampung sebagai tempat pemenuhan hak anak-anak disabilitas. Berdirinya UPT Disabilitas berada dibawah naungan Pemerintahan Kota Bandarlampung. Layanan yang diberikan yaitu pendidikan dan keterampilan yang berupa menjahit, tataboga, musik, membatik, bahasa isyrat, dan lain sebagainya. Layanan yang diberikan bersifat cuma-cuma atau gratis, dan bukan hanya ditunjukan untuk anak-anak sekitar kota Bandarlampung, tetapi seluruh lampung bahkan luar lampung.

2.7 Landasan Teori

Masyarakat, menurut Talcott Parsons, adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung yang masing-masing memiliki tugas tertentu untuk menjamin keteraturan dan keseimbangan sosial. Parsons menjelaskan dalam struktur teorinya bahwa setiap individu dan organisasi harus menjalankan perannya secara fungsional jika masyarakat ingin tetap stabil. Selain itu, ia memperkenalkan skema AGIL (*Adaptation, Goal, Interigation, Latency*) yang merupakan singkatan dari adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan keterlambatan, sebagai empat tugas utama yang harus dilakukan oleh setiap sistem sosial untuk bertahan dan berkembang. Adapun penjelasan mengenai skema AGIL dalam penelitian ini (Turama 2020):

- a) Adaptation (Adaptasi)

Program UPT Disabilitas disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, contohnya : kursus komputer, menjahit, atau kerajinan tangan yang disesuaikan dengan kemampuan penyandang

disabilitas. Tujuan untuk memberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan atau dunia kerja.

b) Goal (Pencapaian)

Setiap program yang berjalan yang berjalan harus memiliki tujuan dan cara mencapainya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah kemandirian penyandang disabilitas melalui pemberdayaan.

c) Intergation (intergasi)

Program pemberdayaan program pemberdayaan melibatkan kerjasama antara penyandang disabilitas, instruktur, pemerintah daerah, dan masyarakat. Integrasi penting agar penyandang disabilitas tidak merasa terpinggirkan, tetapi terintegrasi dalam komunitas dan dunia kerja.

d) Latency (Latensi)

UPT Disabilitas mengajarkan keterampilan, nilai-nilai seperti kemandirian, kepercayaan diri, disiplin, dan keinginan untuk berusaha. Misalnya, memberikan dukungan sosial, pembinaan mental, dan konseling untuk mendorong penyandang disabilitas untuk tetap semangat. Ini menjadi dasar untuk pemberdayaan yang berlanjut setelah pelatihan.

Metode ini dapat dikaitkan langsung dengan fungsionalisme Parsons dalam hal pemberdayaan disabilitas melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, seperti yang dilakukan oleh UPT Disabilitas Lampung. Misalnya, pelatihan menjahit, tata boga, atau kerajinan tangan yang diberikan kepada penyandang disabilitas merupakan contoh nyata dari proses adaptasi, yaitu upaya seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan ekonomi mereka saat ini. Di sisi lain, fungsi pencapaian tujuan terlihat dari tujuan pelatihan itu sendiri, yaitu membantu penyandang disabilitas mencapai kemandirian finansial dan pribadi.

Program pelatihan ini juga membantu proses integrasi sosial. Ini memungkinkan penyandang disabilitas yang biasanya terpinggirkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Mereka dilihat tidak lagi hanya sebagai objek bantuan; sekarang mereka dianggap sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi. Terakhir, fungsi latency atau pemeliharaan pola berkaitan

dengan nilai dan norma sosial yang ditanamkan melalui pelatihan, seperti disiplin, kolaborasi, dan tanggung jawab. Semua ini penting untuk mempertahankan stabilitas sosial dalam jangka panjang.

Berdasarkan teori Parsons, program pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh UPT Disabilitas Lampung dapat dianggap sebagai bagian dari proses sosial yang lebih luas, bukan hanya aktivitas teknis atau pelatihan kerja. Program ini membantu mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif di mana setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang signifikan. Dengan kata lain, program ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial bukan satu-satunya cara untuk mewujudkan integrasi sosial; pemberdayaan fungsional yang sesuai dengan potensi masing-masing individu juga dapat dilakukan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dengan memanfaatkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diharapkan para peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang akan mereka lakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut akan dijadikan referensi untuk membantu peneliti baru dalam memperkuat teori yang digunakan selama penelitian berlangsung dan mencapai harapan yang diinginkan. Berikut adalah hasil penelitian yang ada yang relevan dengan penelitian ini:

- 1. Jurnal dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar” Mutmainah (2023). *Indonesian Journal of Education and Social Sciences*.**

Penelitian ini menggunakan Fenomenologi merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kejadian-kejadian yang terjadi. Penelitian ini menyoroti fenomena peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar, dalam pemberdayaan warga penyandang disabilitas, baik sebagai pelaku yang memiliki peran sebagai pengatur, fasilitator, dinamisator, maupun lainnya. Adapun sumber data pada penelitian ini

berupa data primer dan wawancara. Selanjutnya informan penelitian ini dipilih memakai teknik berupa purposive sampling. Berdasarkan hasil riset yang sudah dilaksanakan, maka bisa disimpulkan bahwasanya Dinas Sosial Kota Makassar telah menjalankan perannya dengan cukup baik sehubungan dengan usaha memberdayakan orang-orang penyandang disabilitas yang terdapat di Kota Makassar. Peranan pemerintah sebagai regulator dibuktikan dengan merumuskan acuan dasar bagi masyarakat yang merupakan instrument guna mengelola berbagai program penyelenggaraan pemberdayaan. Regulasi tersebut berupa Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak penyandang. Perbedaan penelitian sebelumnya berfokus pada peran pemerintah kota makasar terhadap masyarakat disabilitas, sedangkan fokus penelitian ini terkait kemandirian penyandang disabilitas terhadap masa depan.

2. **Jurnal dengan judul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Advokasi Terhadap Aksesibilitas Fasilitas Publik” Ishma Shobhiyah dan Muhtadi (2022) Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora.** Studi ini dilakukan di Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode sampling purposive digunakan untuk memilih informan. Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan. Teori yang digunakan Pemberdayaan (*Empowerment Theory*) – Edi Suharto pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada lembaga HWDI dan pengguna pemandu blok. Penelitian ini menemukan bahwa advokasi khusus untuk penyandang disabilitas menghasilkan kesetaraan hak antara penyandang disabilitas dan orang lain. Teori Edi Suharto mengelompokkan penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang lemah, tetapi penyandang disabilitas hanya dapat melakukan aktivitas di rumah mereka sendiri jika fasilitas publik tersedia. untuk membuat penyandang disabildas merasa aman saat menggunakannya. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah, penelitian sebelumnya

berfokus pada Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Advokasi Terhadap Aksesibilitas Fasilitas Publik. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan kemandirian.

3. **Jurnal dengan judul “Difabel Merajut Asa Berdaya: Pendekatan Strategis Pemberdayaan Difabel oleh Yayasan Pensil Waja Banua Kota Banjarmasin“. Yuni Yemima dan Ismar Hamid (2023) Jurnal Sosiologi.**

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi partisipatif. Yayasan Pensil Waja Banua telah menggunakan pendekatan strategis yang mencakup enabling, empowering, dan protecting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Pensil Waja Banua belum sepenuhnya menerapkan empat prinsip pemberdayaan masyarakat secara optimal, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian dalam pemberdayaan difabel, walaupun pendekatan strategis sudah dilakukan. Prinsip pemberdayaan yang masih belum diimplementasikan secara sempurna adalah partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, serta berkelanjutan. Fokus penelitian sebelumnya mengenai penerapan prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan dan kemandirian. Sedangkan fokus penelitian ini pada pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan kemandirian.

2.9 Kerangka Berpikir

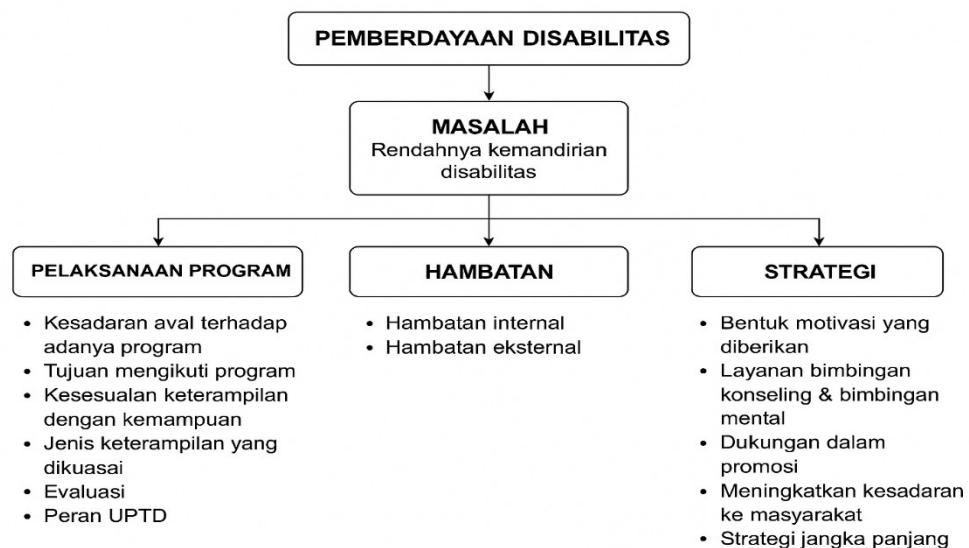
Dimulai dengan pemahaman bahwa penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan yang sering mengalami diskriminasi sosial, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Seringkali, label negatif yang dikaitkan dengan disabilitas menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, terutama di tempat kerja. Untuk mengatasi hal ini, program pemberdayaan melalui pelatihan dan pendidikan keterampilan menjadi cara penting untuk meningkatkan kemampuan dan potensi individu penyandang disabilitas sehingga

mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. UPTD Disabilitas Lampung berfungsi sebagai pelaksana dan menyediakan berbagai jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Pelatihan ini mencakup kerajinan tangan, pijat, menjahit, membatik, dan keterampilan teknologi informasi.

Secara teoritis, kajian ini didasarkan pada gagasan fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Pandangan ini menganggap masyarakat sebagai sistem sosial dengan bagian-bagian yang masing-masing melakukan tugas tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial. Dilihat dari perspektif ini, program pemberdayaan penyandang disabilitas berusaha untuk membantu mereka masuk ke dalam struktur sosial yang lebih luas. Pelatihan dan pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk bekerja, tetapi juga menanamkan norma dan nilai sosial yang memungkinkan mereka diterima dan beradaptasi dengan masyarakat.

Program pemberdayaan berbasis pendidikan dan pelatihan keterampilan dimulai sebagai akibat dari diskriminasi dan keterbatasan akses yang dialami. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam yang berfokus pada individu penyandang disabilitas. Sasaran utama dari program ini adalah memotivasi penyandang disabilitas agar lebih mandiri secara sosial dan ekonomi, sekaligus membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Berdasarkan penjelasan ini, kerangka berpikir dari penelitian ini dapat diilustrasikan melalui diagram yang berikut:

2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik ini dipilih karena dapat menyediakan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata dan didasarkan pada pengalaman langsung. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif, yang berakar pada positivisme, digunakan untuk menyelidiki situasi yang alami (berbeda dengan eksperimen), dan peneliti mengambil peran sebagai instrumen utama.

Metode studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam bagaimana program pemberdayaan membentuk kemandirian pada anak disabilitas di UPT Disabilitas Lampung. Studi kasus adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mempelajari peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan orang atau objek yang akan diteliti lebih lanjut. Hasil penelitian dapat berupa berbagai laporan, seperti biografi dan riwayat hidup, yang membutuhkan banyak informasi (Walgitto, 2004).

Peneliti secara langsung melihat situasi, berinteraksi dengan informan, dan mempelajari makna dari tindakan, pengalaman, dan respons yang diberikan peserta program. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada pelaksanaan program tetapi juga bagaimana program diterima, dimaknai, dan berdampak pada pembentukan kemandirian penyandang disabilitas.

Peneliti telah mengikuti sejumlah prosedur penelitian kualitatif untuk melakukan penelitian di lapangan. Untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang proses pemberdayaan, wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi digunakan. Wawancara mendalam dilakukan dengan peserta latihan keterampilan,

pekerja sosial (peksos). Observasi langsung dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang situasi pembelajaran keterampilan, interaksi antara peserta dan instruktur, dan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di program. Peneliti juga mengumpulkan data administrasi, profil lembaga.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara bertahap, mulai dari pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selama proses ini, pola, kategori, dan hasil yang menggambarkan bagaimana program pemberdayaan di UPTD Disabilitas Lampung membantu membentuk kemampuan dasar kemandirian penyandang disabilitas dapat dibuat. Akibatnya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses perubahan sosial yang dialami peserta program selain menjelaskan kondisi lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Beberapa faktor ini termasuk rekomendasi dari dosen dan senior, literatur dan teori teknis yang relevan, pengalaman pribadi (Hadi, 2021). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka yang akan menjadi fokus penelitian adalah.

- 1) pelaksanaan program dilihat dari berbagai aspek, yaitu:
 - a. Kesadaran awal terhadap adanya program pemberdayaan
 - b. Tujuan Mengikuti Program
 - c. Kesesuaian Keterampilan dengan Kemampuan
 - d. Jenis Keterampilan yang dikuasai
 - e. Evaluasi
 - f. Peran UPTD PRSPD
- 2) Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas yaitu dibagi menjadi dua:
 - a. Internal
 - b. Eksternal
- 3) Strategi yang dilakukan UPTD PRSPD berupa:
 - a. Bentuk motivasi yang diberikan

- b. Layanan Bimbingan Konseling dan Bimbingan Mental
- c. Dukungan dalam promosi
- d. Meningkatkan kesadaran ke Masyarakat
- e. Strategi Berkelanjutan

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana suatu situasi sosial akan dianalisis secara mendalam. Contohnya bisa berada di sekolah, perusahaan, institusi pemerintah, jalan raya, rumah, dan berbagai lokasi lainnya (Sugiyono, 2019). Memilih tempat penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan sasaran studi jelas dan validitas data yang dikumpulkan. Studi ini akan dilakukan di UPT Disabilitas yang terletak di Jl. Pramuka No.48, Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung.. Peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya masalah spesifik terkait penyandang disabilitas, yang memerlukan data khusus dari tempat UPT Disabilitas.

Pemilihan UPT Disabilitas Lampung sebagai lokasi penelitian dilandasi oleh kebutuhan akademik untuk memahami secara komprehensif bagaimana proses pemberdayaan dijalankan dalam sebuah lembaga yang menjadi pusat layanan pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas. UPTD ini tidak hanya menyediakan pelatihan keterampilan, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai lembaga intervensi sosial yang berperan dalam membentuk kemampuan dasar, kesiapan kerja, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menjadikan UPTD sebagai lingkungan sosial yang relevan untuk menelaah praktik, kebijakan, dan mekanisme pemberdayaan dalam kerangka pelayanan publik.

Selain itu, lokasi ini dipilih karena masih terbatasnya penelitian yang mengkaji secara mendalam efektivitas program pemberdayaan pada level lembaga daerah. Keterbatasan literatur tersebut memberikan peluang bagi penelitian ini untuk menghadirkan kontribusi akademik yang signifikan, baik dalam memperkaya pemahaman mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas maupun dalam

menyediakan temuan empiris yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi program di tingkat pemerintahan daerah.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan digunakan untuk memilih subjek penelitian. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa sampel penelitian kualitatif diambil dari narasumber, informan, teman, dan guru penelitian daripada responden. Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian disebut informan. Dalam konteks penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kriteria berikut:

1. Penyandang disabilitas Tunanetra dan Tunadaksa yang ada di UPTD PRSPD Disabilitas Lampung (penyandang disabilitas ini dipilih karena merupakan subjek langsung dari pelaksanaan program pemberdayaan yang ada di UPT Disabilitas Lampung serta memiliki pengalaman yang nyata dalam proses pendidikan dan pemberdayaan).
2. Pegawai Pekerja sosial di UPTD PRSPD Disabilitas Lampung(Alasan memilih pegawai karena mereka memiliki peranan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan disabilitas).

Informan sebaiknya orang yang bersedia berbagi ide dan pengetahuan dengan peneliti dan sering ditanya oleh peneliti. Dengan demikian, informan dianggap mampu memberikan informasi penelitian yang jelas dan dapat diandalkan, serta orang yang bertanggung jawab atas proses produksi di lapangan. Informan harus dapat berbagi informasi dengan penulis. Proses identifikasi informan melalui wawancara langsung kepada informan yang ada di UPT Disabilitas Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data merupakan kegiatan mencari dan menghimpun informasi yang berhubungan dengan fenomena tertentu. Peneliti memulai proses ini dengan menetapkan jenis data yang akan dikumpulkan. Setelah itu, setelah mengenali tipe data yang dibutuhkan, peneliti akan memilih metode pengumpulan data yang paling cocok dengan kebutuhannya. (Sugiyono, 2019).

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah yang akan diteliti. Apabila menginginkan informasi lebih lanjut dari responden, serta jumlah respondennya, apakah kecil atau besar. Pengetahuan dan keyakinan pribadi, atau setidaknya laporan tentang diri sendiri, adalah dasar dari teknik pengumpulan data ini. Proses wawancara kepada 7 informan tidak dilakukan secara bersamaan tetapi di waktu yang berbeda karena menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing informan.

- a) Pada informan SH wawancara dilakukan di asrama perempuan UPTD PRSPD disabilitas Lampung pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 10:00 WIB. Pemilihan waktu karena mempertimbangkan kondisi informan serta situasi lingkungan yang mendukung kelancaran proses wawancara. Pada waktu tersebut, informan SH kebetulan sedang tidak sibuk atau tidak mengikuti aktivitas pelatihan di UPTD. Pemilihan jam 10.00 WIB juga dimaksudkan untuk menghindari waktu istirahat siang, sehingga wawancara dapat berlangsung dengan fokus tanpa gangguan. Selain itu kondisi asrama pada pagi menjelang siang relatif tenang sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam.
- b) Informan AGP wawancara dilakukan di asrama putra pada tanggal 2 oktober 2025 pukul 08;00 WIB Waktu wawancara dipilih karena pada hari tersebut tidak ada jadwal pelatihan maupun kegiatan resmi di UPTD, sehingga informan dalam keadaan lebih tenang dan memiliki kesempatan kosong untuk diwawancarai. Selain itu, sesi dilakukan setelah apel pagi, saat informan masih dalam kondisi bugar, lebih fokus, dan siap memberikan informasi. Pemilihan waktu ini mendukung pelaksanaan wawancara yang lebih lancar tanpa mengganggu rutinitas informan, serta membantu peneliti memperoleh data yang lebih akurat dan menggambarkan pengalaman informan secara mendalam.
- c) Informan MY wawancara dilakukan di asrama putra pada tanggal 2 oktober 2025 pukul 09;00 WIB Waktu wawancara dipilih karena pada hari tersebut tidak ada jadwal pelatihan maupun kegiatan resmi di UPTD, sehingga

informan dalam keadaan lebih tenang dan memiliki kesempatan kosong untuk diwawancara. Selain itu, sesi dilakukan setelah apel pagi, saat informan masih dalam kondisi bugar, lebih fokus, dan siap memberikan informasi. Pemilihan waktu ini mendukung pelaksanaan wawancara yang lebih lancar tanpa mengganggu rutinitas informan, serta membantu peneliti memperoleh data yang lebih akurat dan menggambarkan pengalaman informan secara mendalam.

- d) Informan JW di asrama putra pada tanggal 2 oktober 2025 pukul 10:00 WIB Waktu wawancara dipilih karena pada hari tersebut tidak ada jadwal pelatihan maupun kegiatan resmi di UPTD, sehingga informan dalam keadaan lebih tenang dan memiliki kesempatan kosong untuk diwawancara. Selain itu, sesi dilakukan setelah apel pagi, saat informan masih dalam kondisi bugar, lebih fokus, dan siap memberikan informasi. Pemilihan waktu ini mendukung pelaksanaan wawancara yang lebih lancar tanpa mengganggu rutinitas informan, serta membantu peneliti memperoleh data yang lebih akurat dan menggambarkan pengalaman informan secara mendalam.
- e) Informan A wawancara dilakukan di asrama putra pada tanggal 3 Oktober 2025 pukul 08:30 WIB Waktu wawancara dipilih karena pada hari tersebut tidak ada jadwal pelatihan maupun kegiatan resmi di UPTD, sehingga informan dalam keadaan lebih tenang dan memiliki kesempatan kosong untuk diwawancara. Selain itu, sesi dilakukan setelah apel pagi, saat informan masih dalam kondisi bugar, lebih fokus, dan siap memberikan informasi. Pemilihan waktu ini mendukung pelaksanaan wawancara yang lebih lancar tanpa mengganggu rutinitas informan, serta membantu peneliti memperoleh data yang lebih akurat dan menggambarkan pengalaman informan secara mendalam.
- f) Informan DH wawancara dilakukan di Kantor UPTD pada tanggal 9 oktober 2025 pukul 09:00 WIB. Pemilihan waktu tersebut didasarkan atas pertimbangan kenyamanan dan waktu luang informan, karena di waktu tersebut belum banyak aktivitas atau kegiatan yang mengganggu.

- g) Informan RM wawancara dilakukan di Kantor UPTD pada tanggal 9 oktober 2025 pukul 10:00 WIB. Pemilihan waktu tersebut didasarkan atas pertimbangan kenyamanan dan waktu luang informan, karena di waktu tersebut belum banyak aktivitas atau kegiatan yang mengganggu.

2. Observasi

Bila diadu dengan metode pengumpulan data lainnya, seperti wawancara dan kuesioner, observasi memiliki ciri khas tersendiri. Metode ini tak hanya terfokus pada manusia; melainkan bisa juga melibatkan objek-objek alam lainnya. Observasi merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak proses biologis dan psikologis. Di antara semuanya, proses ingatan dan pengamatan adalah yang paling penting. Ketika observasi digunakan sebagai cara mengumpulkan data, subjek penelitian dapat mencakup perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, serta ukuran sampel yang tidak terlalu besar.

Observasi pada penelitian ini dilaksanakan secara langsung selama peneliti mengikuti kegiatan magang di UPTD Disabilitas Lampung. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti terlibat dalam rutinitas lembaga, memperhatikan pola interaksi antara peserta dan instruktur, alur pelaksanaan pelatihan keterampilan, kehidupan sehari-hari di asrama, serta berbagai aktivitas pendukung lainnya. Observasi yang berlangsung secara berkelanjutan selama masa magang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami perilaku, pola tindakan, dan proses pemberdayaan secara alami sesuai keadaan di lapangan. Melalui keterlibatan langsung tersebut, informasi yang terkumpul menjadi lebih komprehensif, mendalam, dan menggambarkan situasi sosial sebagaimana adanya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan, hasil penelitian kualitatif akan semakin kredibel. Tinggi jika memasukkan dan menggunakan dokumen dalam penelitian kualitatifnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh sebagian besar berupa foto individu atau potret peserta. Meskipun bersifat personal,

dokumentasi tersebut tetap memiliki nilai penting karena membantu peneliti mengenali informan, memahami karakteristik peserta, serta memastikan bahwa proses pengumpulan data benar-benar dilakukan terhadap subjek yang sesuai. Foto tersebut tidak digunakan sebagai objek analisis utama, melainkan sebagai bukti pendukung bahwa peneliti telah melakukan interaksi langsung dengan informan dan terlibat dalam aktivitas penelitian di lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memeriksa dan membahas data secara menyeluruh untuk menemukan makna, interpretasi, dan kesimpulan khusus dari setiap data yang dipelajari. Menyusun, menyeleksi, dan mengolah data secara sistematis dan bermakna juga merupakan bagian dari analisis data. Keakuratan dan ketajaman alat yang digunakan sangat penting dalam analisis data karena ini menentukan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2019).

1. Reduksi Data

Tahap awal dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, yang mencakup pemilihan, pemfokusan, dan abstraksi data dari berbagai sumber agar relevan dengan tujuan penelitian. Tujuan reduksi data adalah untuk membuat data lebih mudah dianalisis dengan cara yang lebih sederhana. Untuk memastikan bahwa analisis tidak terganggu oleh informasi yang tidak penting, proses reduksi data juga melibatkan pembuangan data yang tidak relevan atau berlebihan. Untuk mengorganisasikan data dalam kategori yang lebih kecil, teknik seperti pengkodean atau coding sering digunakan. Ini membuat data lebih mudah untuk diinterpretasikan dan dibandingkan (Dewi, 2025). Pada saat reduksi data peneliti akan membuat rangkuman dari data yang sudah diterima mengenai program pemberdayaan membentuk kemandirian pada anak disabilitas di UPT Disabilitas Lampung. Dilakukan dengan memilih informasi yang cocok dengan fokus penelitian serta menghapus atau menghilangkan data yang tidak berkaitan, agar memudahkan penulisan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam format yang terstruktur agar lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis. Pada penelitian

kualitatif, data bisa disajikan dalam bentuk matriks, tabel, diagram, atau narasi deskriptif yang memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar variabel. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk memberikan pandangan yang jelas mengenai hasil penelitian serta memfasilitasi proses pengambilan kesimpulan. Usai data disaring melalui reduksi, data tersebut kemudian disajikan sebagai narasi deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan mengenai program pemberdayaan membentuk kemandirian pada anak disabilitas di UPT Disabilitas Lampung secara terperinci, hal ini membuat pembaca lebih mudah memahami.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan penelitian adalah langkah akhir dalam analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah proses yang berkelanjutan yang dapat berubah seiring dengan kemajuan analisis data. Hasil dari pengumpulan dan analisis data harus menunjukkan kesimpulan yang diambil. Peneliti kualitatif harus memverifikasi temuan mereka untuk memastikan bahwa mereka benar dan valid. Teknik triangulasi membandingkan data dari berbagai sumber atau metode untuk memastikan bahwa temuan konsisten adalah salah satu metode verifikasi. Dalam hal ini kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang telah peneliti temukan serta menjawab tiga pertanyaan yang meliputi pelaksanaan program, hambatan dan strategi.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Triangulasi merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data dan analisis. Pada intinya, konsep ini beranggapan bahwa fenomena yang sedang dipelajari bisa dipahami dengan lebih akurat jika dilihat dari banyak perspektif. Melihat satu fenomena dari berbagai pandangan akan membantu dalam mendapatkan tingkat kebenaran yang lebih dapat diterima. (Sugiyono, 2019).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan pengujian data dari beragam sumber atau informan sebelum datanya diambil. Cara ini bisa membantu meningkatkan kredibilitas data dengan meninjau data yang telah didapatkan selama penelitian dari berbagai sumber atau informan. Lewat teknik triangulasi sumber, peneliti berupaya

membandingkan data. Singkatnya, triangulasi sumber berarti memverifikasi data dari beragam sumber dengan membandingkan fakta dari tiap-tiap sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keandalan data. Hal ini dicapai dengan memakai beragam metode untuk menemukan serta memastikan kebenaran data dari sumber yang sama. Artinya, peneliti menerapkan variasi teknik pengumpulan data guna memperoleh data dari sumber yang identik. Dalam konteks ini, mereka bisa memadukan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengkombinasikannya untuk menarik kesimpulan. Triangulasi teknik berarti memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari satu sumber yang sama.

Triangulasi teknik pada penelitian ini diterapkan untuk memastikan keandalan data dengan memanfaatkan beragam metode pengumpulan informasi yang diarahkan pada sumber yang sama. Peneliti tidak terpaku pada satu cara, melainkan memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta menyeluruh mengenai situasi lapangan. Pelaksanaan triangulasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas pekerja UPTD, para pengajar, serta interaksi sehari-hari teman-teman peserta. Hasil observasi tersebut kemudian diperkuat dengan temuan wawancara dan peninjauan dokumen maupun rekaman percakapan yang relevan. Dengan menggabungkan berbagai teknik tersebut, peneliti dapat mengecek konsistensi informasi sekaligus memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kenyataan di lapangan. Melalui pendekatan yang beragam namun saling melengkapi ini, kredibilitas informasi dari sumber yang sama menjadi lebih terjamin.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung

Berdasarkan surat dari Direktur Rehabilitasi Penyandang Cacat (RPC) dengan Nomor 83/RPC/TU/V/1999 tertanggal 10 Mei 1999, serta surat dari Direktur Jendral Bina Rehabilitasi Sosial pada tanggal 11 Mei 1999, Panti Sosial Bina Netra "Indra Kesuma" telah resmi berpindah ke tempat baru. Awalnya, lokasi sebelumnya berada di Jalan Teuku Umar gang Semangka Nomor 24 Gedung Meneng Kedaton Bandar Lampung, kini beralamat di Jalan Pramuka Nomor 48 Kemiling Bandar Lampung, berdasarkan surat dari Departemen Sosial RI Nomor 743/BRS/1.b/V/1999 tertanggal 28 Mei 1999.

Pada tanggal 13 Mei 2008, UPTD Panti Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra Lampung berubah menjadi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung sesuai dengan PERGUB No. 14 Tahun 2008. UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berfokus pada Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Tugas utama UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah melakukan pelayanan, rehabilitasi, dan penyaluran untuk penyandang disabilitas.

4.2 Tujuan, Visi, dan Misi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung

a. Visi

Mencapai keadaan di mana para penyandang disabilitas dapat mandiri dan hidup sejahtera.

b. Misi

Menciptakan kondisi di mana penyandang disabilitas tidak perlu bergantung pada orang lain dan mampu menjalankan fungsi sosial mereka dengan baik.

c. Tujuan

Penyandang disabilitas dibina dan direhabilitasi sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

4.3 Tugas dan Fungsi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung

a. Tugas Pokok

UPTD PRSPD Dinas Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk menyediakan layanan sosial serta rehabilitasi bagi para penyandang disabilitas. mencakup pelatihan keterampilan aspek fisik, mental, sosial, serta pelatihan lain yang dapat membantu penyandang disabilitas terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Fungsi

1. Menawarkan pelayanan serta rehabilitasi untuk penyandang disabilitas.
2. Mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.
3. Melakukan penyebaran serta rujukan bagi penyandang disabilitas.
4. Menjalankan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.

4.4 Struktur Organisasi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas



Sumber daya manusia dalam pelaksanaan lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas harus memperhatikan beberapa aspek berikut:

a. Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi terbagi menjadi dua bagian, yakni:

- 1) Administrasi Kepegawaian;
- 2) Administrasi yang berhubungan dengan penyandang disabilitas.

b. Tenaga Teknis

Tenaga teknis yang berhubungan dengan layanan dan rehabilitasi sosial dapat terdiri dari:

1) Pekerja Sosial

Individu ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial. Mereka memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial dan telah mengikuti pelatihan dalam pekerjaan sosial.

2) Tenaga Medis

Profesional medis memberikan layanan kesehatan dan memiliki pendidikan serta latar belakang dalam bidang kedokteran dan keperawatan.

3) Tenaga Instruktur

Mereka menyediakan layanan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tersebut.

4) Tenaga Rohaniawan

Bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan dalam bidang keimanan atau agama dengan tujuan membimbing dan mendampingi kegiatan ibadah. Mereka memiliki pendidikan dalam bidang keagamaan.

5) Tenaga Penunjang

Terdiri dari pembina asrama, juru masak, penjaga keamanan atau Satpam, tukang kebun, petugas kebersihan, dan supir.

4.5 Layanan atau Fasilitas UPTD PRSPD

Layanan dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung menyajikan berbagai fasilitas, antara lain:

- a) Tempat penginapan
- b) Makanan
- c) Pakaian (termasuk sepatu, perlengkapan ibadah, dan sejenisnya)
- d) Peralatan pendidikan dan keterampilan
- e) Alat-alat untuk kebersihan diri serta lingkungan
- f) Obat-obatan

4.6 Program Rehabilitasi Sosial UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi

Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung mencakup beberapa aspek:

A. Pelatihan dan Rehabilitasi yang meliputi:

- 1) Bimbingan Mental: Melibatkan pendidikan agama, etika, penggunaan braille dalam bahasa Arab, serta pengembangan kecerdasan melalui membaca, menulis braille, dan berhitung, selain pengetahuan umum.
- 2) Fisik: Melibatkan aktivitas olahraga dan perhatian pada kesehatan.
- 3) Sosial: Mengajarkan kegiatan sehari-hari, resosialisasi, dan keterlibatan dalam partisipasi sosial.
- 4) Keterampilan: Meliputi pelatihan dalam pijat, seni seperti musik dan nasyid, mengetik menggunakan braille, penggunaan komputer berbicara (JAWS), dan keterampilan tangan lainnya.

B. Penyaluran atau terminasi:

- 1) Dikembalikan kepada orang tua.
- 2) Berwirausaha atau bergabung dalam KUBE (Kelompok Usaha Bersama).
- 3) Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4.7 Persyaratan Penerimaan Calon Kelayan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung

- a) Penderita cacat netra, rungu, tubuh baik pria maupun wanita
- b) Usia 10-30 tahun
- c) Tidak cacat ganda.
- d) Sehat jasmani, tidak berpenyakit kronis dan menular
- e) Surat pernyataan dari orangtua/ wali yang berkaitan dengan:
 - 1) Bersedia menerima kembali seseorang setelah mereka menyelesaikan program pelayanan serta rehabilitasi di panti;
 - 2) Bersedia menerima kembali seseorang yang dikembalikan karena tidak dapat menjalani program pendidikan, pelatihan, atau layanan rehabilitasi sosial dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - 3) Dikeluarkan akibat pelanggaran peraturan tertentu.
- f) Mengisi formulir yang telah disediakan;
- g) Surat keterangan asal;
- h) Foto ukuran 4x6 sejumlah 4 lembar;
- i) Pendaftaran atau pengiriman secara langsung ke UPTD PRSPD Lampung yang beralamat di Jalan Pramuka No.48 Kemiling, Bandar Lampung;
- j) Tidak dikenai biaya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tabel, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh UPTD telah berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Keberagaman latar belakang informan, baik dari sisi jenis disabilitas, peran, maupun lama mengikuti program, menunjukkan bahwa proses pemberdayaan membutuhkan waktu dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan individu. Lama keikutsertaan dalam program berperan penting dalam membentuk keterampilan, kepercayaan diri, serta kesiapan peserta menuju kemandirian.

- a) Pelaksanaan program secara umum dipandang positif, terutama dalam hal penguasaan keterampilan. Namun, tidak semua peserta memberikan dukungan pada setiap aspek, yang mencerminkan adanya perbedaan pengalaman, tingkat pemahaman, dan kesesuaian program dengan kebutuhan peserta. Hambatan internal, seperti keterbatasan diri, rasa takut, kesulitan bertahan, dan rendahnya kepercayaan diri, masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi proses pemberdayaan. Selain itu, hambatan eksternal berupa stigma masyarakat, keterbatasan fasilitas dan kesempatan kerja, serta belum optimalnya dukungan pascaprogram dan perhatian pemerintah turut memengaruhi keberhasilan program.
- b) Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam program pemberdayaan terdiri atas hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan dalam diri, seperti kondisi fisik dan psikologis, rasa takut, kesulitan bertahan saat menghadapi tekanan, kendala dalam menerapkan keterampilan, serta rendahnya kepercayaan diri

untuk bersaing. Hambatan ini menunjukkan bahwa kesiapan mental dan penguatan kepercayaan diri menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup kurangnya dukungan pascaprogram, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja, adanya stigma dari masyarakat, kurangnya perhatian pemerintah, keterbatasan fasilitas umum yang ramah disabilitas, serta terbatasnya kesempatan kerja yang sesuai. Hambatan eksternal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan struktural belum sepenuhnya mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Oleh karena itu, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya bergantung pada pelatihan keterampilan, tetapi juga memerlukan dukungan berkelanjutan dan lingkungan yang lebih inklusif.

- c) Strategi yang dilakukan UPTD, seperti pemberian motivasi, layanan bimbingan konseling dan mental, dukungan promosi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perencanaan strategi berkelanjutan, dinilai berperan penting dalam mendukung proses pemberdayaan. Dengan demikian, program pemberdayaan ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian penyandang disabilitas, namun tetap memerlukan penguatan pada aspek penyesuaian kebutuhan individu, pendampingan berkelanjutan, dan dukungan lingkungan agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara optimal.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu:

- a. Bagi UPTD PRSPD Lampung

UPTD perlu terus meningkatkan mutu pelatihan dengan menyesuaikan materi dan kurikulum pada kebutuhan pasar kerja saat ini, termasuk menambahkan pelatihan berbasis teknologi dan keterampilan yang lebih modern. Kerja sama dengan berbagai pihak perusahaan, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial juga perlu diperluas untuk membuka akses penyaluran kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Selain itu,

peningkatan sarana, fasilitas, dan alokasi anggaran menjadi langkah penting agar proses pelatihan berjalan lebih efektif. UPTD dianjurkan untuk tidak hanya berhenti pada penyampaian rencana atau wacana strategis, tetapi juga perlu mengembangkan langkah pelaksanaan yang lebih konkret dan dapat diukur. Sejumlah strategi yang selama ini masih berupa arahan lisan seperti perluasan kemitraan, peningkatan promosi hasil karya peserta, serta penambahan jenis pelatihan yang lebih modern—sebaiknya ditindaklanjuti menjadi program nyata yang memiliki waktu pelaksanaan, target keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Implementasi strategi secara langsung menjadi hal yang penting agar proses pemberdayaan tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi penyandang disabilitas.

b. Bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas diharapkan dapat lebih aktif dan berkomitmen dalam mengikuti setiap sesi pelatihan, menjaga kedisiplinan, serta terus mengembangkan kemampuan yang sudah diperoleh. Upaya membangun kepercayaan diri juga penting agar peserta dapat menerapkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika memasuki dunia kerja.

c. Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas kerja yang aksesibel dan mendorong perusahaan menerima tenaga kerja disabilitas. Selain itu, dukungan anggaran bagi lembaga pelatihan perlu ditingkatkan agar program pemberdayaan dapat berjalan secara optimal.

d. Bagi Dunia Usaha

Perusahaan diharapkan lebih inklusif dan terbuka dalam menerima pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Kolaborasi dengan UPTD PRSPD Lampung juga dapat memperluas jalur penyaluran kerja serta mendukung penerapan praktik ketenagakerjaan yang ramah disabilitas.

e. Bagi penelitian selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk melakukan kajian komparatif antar lembaga pelatihan atau menggali lebih dalam pengaruh faktor lingkungan, keluarga, maupun budaya terhadap keberhasilan pemberdayaan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai strategi yang paling efektif dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, R. P. H. (2025). Layanan Konseling Karir Untuk Persiapan Memasuki Dunia Kerja Bagi Tunadaksa Di Uptd Pelayanan Dan Rehabilitas Penyandang Disabilitas (Prspd) Dinas Sosial Provinsi Lampung (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Aprilia, I. D., Permana, J., & Syarifah, L. S. (2019). Analisis Kebutuhan Pelatihan Kewirausahaan: Sebuah Upaya Pengembangan Kemandirian Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19(3), 356–365.
- Ariyanti, S. (2023). *Ketidak-adilan dan Disabilitas: Studi Kasus tentang Perlakuan Diskriminatif Terhadap Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Astuti, R. F., & Putri, K. A. (2024). Peran Pendidikan Inklusif: Strategi dan Tantangan dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Anak-Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 8(2), 109-119.
- Astuti, S. P. (2022). Bimbingan Karir Bagi Penyandang Disabilitas Di Yayasan Citra Baru Sukaramo Kota Bandar Lampung, 1–23. Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/18594/1/PERPUS PUSAT 1 2.pdf>
- Baturangka, T., Kaawoan, J., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Cahyono, S. A. T. (2017). Penyandang disabilitas: menelisik layanan rehabilitasi sosial difabel pada keluarga miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 239-254.
- Chodzirin, M. (2013). Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang

Disabilitas. *Semarang: IAIN Walisongo.*

Dahlan, M. & Anggoro, S. A. (2021). Hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor publik: antara model disabilitas sosial dan medis. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 1-48.

Dewi, S. U. (2013). Korelasi Pelatihan Vokasional Dengan Kompetensi Penyandang Disabilitas Alumni Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (Bbrvbd), Cibinong. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 2(2), 165-182.

Dewi, P. (2025). Metode Penelitian Kualitatif Bab. *Metode Penelitian Kualitatif*, 101.

Eko. (2013). Pengertian Peranan. <http://Eko.com/2013/05/Pengertian-Peranan.html>. Diakses 01 september 2014.

Hadi, A. (2021). *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. CV. Pena Persada.

Halawati, F. (2020). Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Perilaku Siswa. *Education and Human Development Journal*, 5(2), 51-60.

Halim, A. (2022). Signifikansi Dan Implementasi Berpikir Kritis Dalam Proyeksi Dunia Pendidikan Abad 21 Pada Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(3).

Hayati,S. (2019). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. Skripsi.

Indira, G. (2024). *Implementasi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas*

- Sosial Provinsi Riau* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ismawati, I., & Hartanto, R. V. P. (2018). Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Daksa dalam Rangka Meningkatkan Akses atas Pekerjaan. *Sosio Informa*, 4(3).
- Jannah, F. (2024). Teknik Komunikasi Barista Tunarungu Sunyi Coffee Dengan Konsumen, 8(1), 57–66.
- Joesyiana, K. & Susanti, D. (2022). Pelatihan Strategi Berwirausaha Bagi SDM Penyandang Disabilitas Terlantar Provinsi Riau. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 81-90.
- Kerka, S. (2002). *Learning Disabilities and Career Development*. Columbus: ERIC Clearinghouse on Adult Career and Vocational Education, Office of Educational Research and Improvement, Department of Education.
- Kristiandy, F. (2021). Analisis kesejahteraan hak penyandang disabilitas: Situasi, kondisi, permasalahan dan solusi penyandang disabilitas di lingkungan sekitar dan lembaga pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 4(1), 125-134.
- Kurniawan, A. (2020). Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(2), 81-86.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*.
- Mozes, N. Z. (2020). Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 8(3), 72–81.

<https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>

Mutmainnah, M. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Education and Social Sciences*, 2(1), 34-43.

Najati, F. (2021). *Proses Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Rungu Wicara (Studi kasus: Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati Jakarta)* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Nasution. A., & Irham, M. (2024). Efektivitas Pelatihan Keterampilan Kerja Dalam Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja:(Studi Kasus Di BLK Kota Padangsidimpuan). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(1), 262-270.

Nofiani, N. S., Kasnawi, M. T., & Hasbi, H. (2022). Penyandang Disabilitas Dalam Pasar Tenaga Kerja: Realita Dan Harapan. *Sosio Informa*, 8(1).

Rianto, A. S.Sos, M.S.i. (2024, hal 102). *Sosiologi: Suatu Pengenalan Ringkas*. K-Media.

Rini, A. S., & Purnama, C. Y. (2022). Kontribusi Bentuk Dukungan Pekerja Sosial terhadap Kepercayaan Diri Penyandang Disabilitas di PRSPD. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 21(01).

Rizqia, A. N., & Purnaweni, H. (2021). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 332-342.

Rosalina, R., & Setyowati, N. (2024). Stigma penyandang disabilitas dalam bekerja di Indonesia: Literature review. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), 1076-1086.

Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran paradigma dalam disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166-176.

- Santoso, K., Salsabila, N., Hanik, U., & Rahmawati, R. (2023). Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan membuat batik. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 145-152.
- Shobiihah, I. (2022). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Advokasi Terhadap Aksesibilitas Fasilitas Publik (Studi Kasus pada DPP Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)) (*Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*).
- Silranti, M. (2019). Pengembangan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di TK Dharmawanita Tunas Harapan. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 6(2), 77–83.
<https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v6i2.5539>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparmi, S., Ekowarni, E., Adiyanti, M., & Helmi, A. F. (2018). Pengasuhan sebagai Mediator Nilai Anak dalam memengaruhi Kemandirian Anak dengan Down Syndrom. *Jurnal Psikologi*, 45(2), 141.
<https://doi.org/10.22146/jpsi.34716>
- Supena, A., & Munajah, R. (2020). Analisis kesulitan belajar membaca anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. *Jurnal basicedu*, 5(1), 10-18.
- Supron, R. (2025). *Kebijakan Pemerintah Daerah Guna Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Lampung* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott

Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58-69.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Utami, S. (2023). Pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan dalam mewujudkan kemandirian sosial (Studi Kasus Slb Asy-Syifa'Selong) (*Doctoral dissertation, UIN Mataram*).

Walgitto. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta:

Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jilid, 20*, 127–142.

Widowati, L. R. (2017). *PROGRAM PELATIHAN VOKASIONAL BAGI PENYANDANG DIFABILITAS* (Studi Kasus: Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).

Yaini, F. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung) (*Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*).

Yanti, S. G. D., Ngabiyanto, N., Sunarto, S., & Wijayanti, T. (2022). Efektivitas Kebijakan Pelatihan Kerja Pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat dalam Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. *Unnes Political Science Journal*, 6(2), 76-81.

Yemima, Y., & Hamid, I. (2023). Difabel Merajut Asa Berdaya: Pendekatan Strategis Pemberdayaan Difabel oleh Yayasan Pensil Waja Banua Kota Banjarmasin. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 31-41.

Zahara, J. N. (2019). *Ikhtiar Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Mental (Down Syndrome) Melalui Program Dana Sosial (Studi Di Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).